

Ali Sastroamidjojo, Merombak Pola Kekuatan Dunia

Oleh Ruben Nalenan

Dia, Ali Sastroamidjojo, menurut Ruben Nalenan, dalam kehidupan sehari-hari amat bersahaja. Dalam kesederhanaan ini, dia tampil sebagai seorang negarawan yang jatuh bangun dengan kabinetnya, justeru pada saat-saat sulitnya sebuah pemerintahan menjalankan fungsinya. Tapi dia sempat mencatat prestasi besar. Dia berhasil membuat polar baru dalam usaha melahirkan perimbangan kekuatan dunia dengan menggalang kekuatan Asia-Afrika yang dicetuskan dalam Dasasila Bandung, yang pengaruhnya masih terasa sampai sekarang.



Damai di Bumi

Sebagai negarawan, terutama sebagai pemain politik yang lihai di atas panggung, karier Ali Sastroamidjojo meluas sampai ke tingkat internasional. Sebagai Perdana Menteri, dialah yang paling berhasil menyelenggarakan suatu konferensi internasional dalam sejarah bangsa kita. Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955, tidak hanya mengangkat nama bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa di planet bumi kita ini, tapi juga mengangkat figur Ali ke tingkat internasional. Konferensi Asia-Afrika adalah tipe konferensi yang unik. Tak pernah tercatat dalam sejarah sebelumnya, peristiwa internasional serupa itu.

Kita mencatat lima negara sebagai sponsor konferensi ini ialah: Indonesia, India, Birma, Pakistan dan Sri Lanka (Ceylon). Di antara negara-negara ini ada kesenjangan-kesenjangan. Ada perbedaan-perbedaan historis di antara negara-negara sponsor ini dengan kedua blok yang berhadapan ketika itu, yakni blok Timur dan blok Barat. Antara India dan Pakistan yang hari kelahirannya sama itu—15 Agustus 1947—pun ada pertentangan besar soal Kashmir.

Sebagai seorang diplomat yang berpengalaman luas, sejak awal Ali berusaha keras memendam pertentangan yang mungkin timbul di antara negara-negara sponsor. Syarat yang diajukannya kepada Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Sri Lanka, agar dalam konferensi di Colombo itu Perdana Menteri Ceylon itu tidak menonjolkan sengketa antara negara peserta.¹ Syarat tersebut sangat penting bagi Ali untuk menggolkan gagasannya agar kelima negara peserta konferensi di Colombo itu akan menjadi sponsor dalam suatu konferensi internasional yang lebih luas dan meliputi negara-negara Asia-Afrika. Ali berhasil "menggingring" India, Pakistan, Birma dan Sri Lanka menjadi negara sponsor Konferensi Asia-Afrika meskipun pada mulanya begitu pesimis akan keberhasilan suatu konferensi internasional yang dilontarkan Ali. Jawaharlal Nehru, Moh. Ali, Sir John Kotelawala dan U Nu memberi kepercayaan penuh kepada Ali dengan Indonesianya untuk menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Dengan kepercayaan itu pulalah Ali bersama

¹ Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Di Perjalananku*, cetakan I, (Jakarta: P.T. Kinta, 1974), hal. 461.

Prof. Sunario, Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu, dan seluruh staf Departemen Luar Negeri, bekerja keras mengadakan pendekatan terhadap negara-negara yang sudah mendapat persetujuan bersama dari kelima Perdana Menteri negara sponsor untuk diundang. Konferensi Asia-Afrika itu berhasil menyatukan 29 negara dari Asia-Afrika dengan perbedaan-perbedaan historis, paham dan ideologi, termasuk sistem ekonominya.

Semua pemimpin dunia yang berkumpul di Bandung ketika itu berusaha keras untuk memecahkan problema-problema internasional yang penuh peperangan dan pergolakan yang seakan-akan tanpa akhir. Dalam pidatonya di depan sidang Konferensi Asia-Afrika, Ali yang dipilih secara aklamasi menjadi Ketua Konferensi menandakan, perdamaian yang didambakan dan yang dicari bukanlah perdamaian palsu. Perdamaian palsu menurutnya adalah perdamaian yang dipaksakan melalui kekuasaan negara besar kepada negara-negara yang tak berdaya seperti pembentukan Pax Romana dulu dengan semboyan: *Si vis pacem para bellum* (kalau menghendaki damai haruslah bersiap-siap untuk perang).² Ali lantas meminta para peserta konferensi melihat pada perlombaan senjata atom dalam mencapai keunggulan kekuasaan dan kekuatan antara negara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi 'impian' suatu perdamaian baru. Katanya hal itu suatu impian kosong karena ketika mereka "bangun", ternyata bahwa bukanlah perdamaian paksaan yang dicapai melainkan penghancuran total umat manusia.³ Ia selanjutnya mengajak seluruh peserta konferensi, sebagai wakil hampir dua pertiga penduduk dunia itu untuk berbicara dengan bahasa yang sama agar dimengerti dan dihayati seluruh dunia, sehingga dapat memberi sumbangan besar bagi perdamaian dan kerjasama dunia.

Apa yang didambakan Ketua Konferensi tercapai dengan lahirnya satu bahasa dalam berbagai persoalan internasional, misalnya tentang rumusan Dasasila Bandung, persoalan tentang anticolonialisme dan negara-negara jajahan yang sedang bergulat untuk

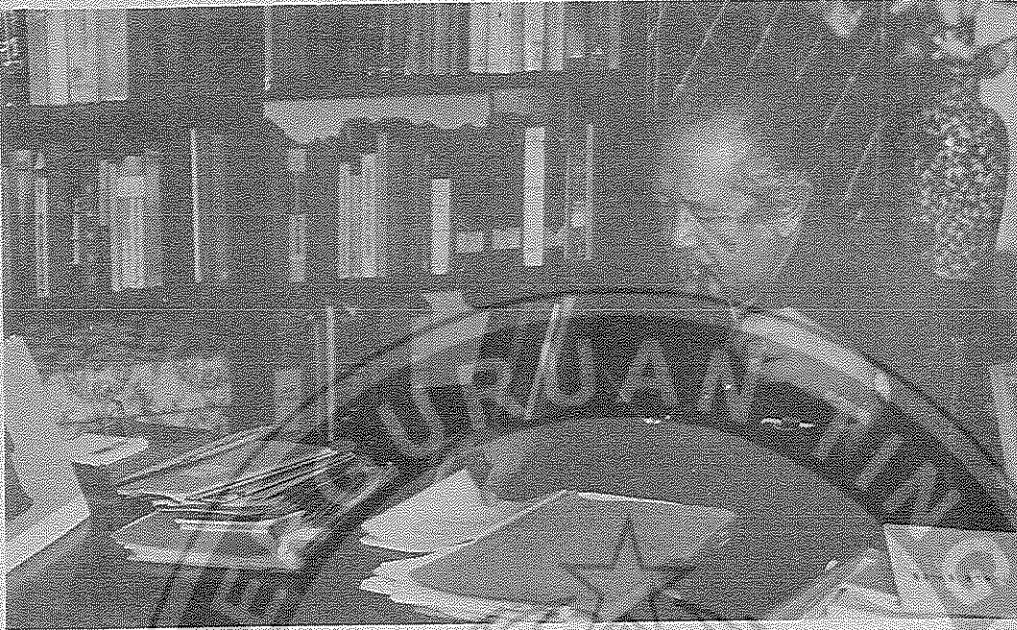
mencapai kemerdekaannya. Melalui Konferensi Asia-Afrika, Ali dan anggota-anggota delegasi Indonesia berhasil mendapat dukungan negara-negara Asia-Afrika dalam tuntutan untuk "mengembalikan" Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi. Itulah sebabnya PBB menjadi intensif menangani persoalan Irian Barat. Namun dampak lebih nyata dari konferensi itu ialah bahwa dalam satu dasawarsa post konferensi, negara-negara yang merdeka di Asia, dan terutama Afrika, mencapai jumlah sekitar empat puluh buah. Dapat dibayangkan berapa ratus juta umat manusia yang keluar dari belenggu penderitannya dengan kemerdekaan tersebut?

Mata hati dunia akan mau menoleh lagi ke belakang untuk melihat pada Konferensi Asia-Afrika apabila menyaksikan pendekatan yang makin meningkat antara kedua *super power* dunia pada bagian pertama dasawarsa 70-an. Tidak hanya ada pendekatan antara Washington dengan Kremlin, tapi malah Nixon turun ke daratan Cina dan mengadakan pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Cina ketika itu Chou En Lai. Ternyata pernyataan bersama mereka didasarkan kepada prinsip *peaceful co-existence*.

Orang yang belajar sejarah dan politik internasional, tentu akan segera menghubungkan peristiwa itu dengan Konferensi Asia-Afrika yang menerima prinsip *peaceful co-existence* sebagai prinsip sangat penting dalam usaha mencari perdamaian di dunia. Prinsip ini pula yang mengilhami pertemuan-pertemuan internasional lainnya seperti KTT Non Blok, yang muncul dengan wajah berbeda, akan tetapi hakekatnya sama, mencari perdamaian dunia. Ali kemudian menulis dalam otobiografinya bahwa pada tanggal 23 April 1955, sehari sebelum usainya "minggu bersejarah" dari Konferensi Bandung itu, ia berhasil mengajak Chou En Lai untuk mengeluarkan pernyataan ajakan berunding kepada Amerika Serikat. Di depan para wartawan dalam dan luar negeri, Chou En Lai menyatakan: *The Chinese people are friendly to the American people. The Chinese people do not want to have a war with the United States of America. The Chinese Government is willing to sit down and enter into negotiations with the United States Government to discuss the question*

2 DPP-PNI, *PNI/Front Marhaenis dan Dasawarsa Bandung*, (Jakarta: 1965), hal. 72.

3 *Ibid.*



Ali Sastroamidjojo pada tahun-tahun terakhir hidupnya

of relaxing tension in the Far East and especially the question of relaxation tension in the Taiwan area.⁴ Tawaran berunding dari Chou En Lai itu baru disambut oleh Amerika 17 tahun kemudian ketika Presiden Nixon mengunjungi RRC pada bulan Februari 1972.

Demikianlah kita saksikan bahwa figur dan nama Ali Sastroamidjojo telah menyatu dengan Konferensi Asia-Afrika, di samping Presiden Soekarno yang telah memberikan dorongan kuat kepadanya. Keberhasilan Ali ini disebabkan "tekad banteng" dan pengalamannya yang luas dalam diplomasi internasional.

Diplomasi

Ketika berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Leiden, dan menjadi anggota aktif dari Perhimpunan Indonesia, Ali dan teman-temannya telah melibatkan diri dalam berbagai kongres internasional seperti kongres untuk perdamaian internasional di Bierville, Perancis, tanggal 15 Agustus 1926, kongres internasional menentang kolonialisme yang diselenggarakan

oleh Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Brussel, tanggal 10-15 Februari 1927.

Meskipun tidak ikut serta sebagai utusan Perhimpunan Indonesia ke kongres-kongres tersebut, Ali tak luput dari kena "getah". Perhimpunan Indonesia diuduh melibatkan diri dalam kegiatan komunis internasional. Pemerintah Belanda bertindak dengan mengadakan pengeledahan dan penangkapan. Pada tanggal 10 Juli 1927, jam 10.00, tempat kediaman Ali sekeluarga dan beberapa teman lainnya di Waastraat No. 1 Leiden diobrak-abrik polisi. Kelanjutannya ialah penangkapan terhadap Moh. Hatta, Nazir Pamuncak, Abdulmadjid Djodjodiningrat dan Ali Sastroamidjojo. Mereka dimasukkan ke dalam tahanan di Den Haag sampai pada tanggal 22 Maret 1928 Pengadilan Negeri menyatakan keempat tertuduh tidak bersalah dan membebaskan mereka.

Pengalaman pahit Ali yang sekaligus mencurahkan dirinya ke dalam persoalan-persoalan internasional, menjadi bibit yang terus tumbuh sesudah proklamasi. Sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Negara di Yogya, dan wakil dari PNI, untuk pertama kali Ali dilibatkan dalam urusan-urusan internasional. Kali ini, menghadiri *The Asian Relations*

4 Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hal. 509

Conference atas prakarsa Pandit Jawaharlal Nehru yang diselenggarakan di New Delhi pada tanggal 23 Maret-2 April 1947. Pengalaman berikutnya ialah sebagai Wakil Ketua Delegasi Indonesia dalam perundingan di atas geladak kapal "Renville". Ali yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran dalam Kabinet Amir Syarifuddin II, ikut serta dalam perundingan sebagai wakil PNI. Perundingan Renville yang dimulai tanggal 8 Desember 1947, menghasilkan Persetujuan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.

Hasil perundingan Renville itu diperdebatkan lagi di sidang Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan di Lake Success, dekat New York. Kali ini, Ali yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (P.P. dan K) pada kabinet presidensial pimpinan Bung Hatta, ditunjuk sebagai jurubicara Republik Indonesia. Ia diberi kesempatan untuk berbicara dalam forum Dewan Keamanan pada tanggal 17 Februari dan tanggal 21 Februari. Kesulitan yang dihadapinya ketika itu ialah karena persoalan Indonesia tidak populer di PBB dan masyarakat Amerika. Masalah-masalah dunia lainnya seperti masalah Palestina dan masalah Kashmir menenggelamkan masalah Indonesia. Agar persoalan Indonesia mendapat perhatian luas di PBB, khususnya anggota Dewan Keamanan, Ali mengeluarkan pernyataan pers yang mengecam pidato Ratu Wilhelmina tentang Indonesia. Pernyataan tersebut dimuat secara luas dalam surat kabar *The New York Times* dan beberapa koran terkenal lainnya. Di samping itu ia mengadakan pendekatan (*approach*) dengan beberapa anggota Dewan Keamanan dan Sekjen PBB, Ketua sidang Dewan Keamanan. Perhatian yang lebih serius dari PBB dan khususnya Dewan Keamanan terhadap Indonesia, terutama setelah agresi Belanda yang kedua, tentu tidak dapat dipisahkan dengan misi yang dibawa Ali.

Resolusi Dewan Keamanan yang penting dalam usaha penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda ialah resolusi tanggal 28 Januari 1949 yang mendesak Belanda untuk menghentikan agresinya dan memulihkan Pemerintahan R.I. seperti sediakala. Bertolak pada resolusi inilah dimulai lagi perundingan antara Indonesia-Belanda. Delegasi Indo-

nesia diketuai oleh Mohammad Roem bersama Ali Sastroamidjojo sebagai Wakil Ketua sementara delegasi Belanda diketuai J.A. van Royen. Perundingan yang dimulai pada tanggal 14 April di bawah naungan UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) di Hotel Des Indes, Jakarta (sekarang Duta Merlin), berakhir dengan persetujuan Roem-Royen tanggal 7 Mei. Persetujuan inilah yang mengantarkan Indonesia dan Belanda serta BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) ke meja perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag. Ali diikutsertakan lagi sebagai anggota dalam delegasi yang diketuai Mohammad Hatta. Konferensi Meja Bundar yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949, menghasilkan "penyerahan"⁵ kedaulatan dari pihak Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat).

Menurut Ali, dalam perjalanan pulang dari Nederland menuju Yogya, di atas pesawat, sebagai Perdana Menteri RIS Bung Hatta mengangkat Ali menjadi Duta Besar RIS untuk Amerika Serikat. Selama tiga tahun bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, yang kemudian merangkap sebagai Duta Besar untuk Kanada dan Mexico, Ali sempat mencari hubungan dan pengalaman yang luas dengan pihak Barat maupun Timur. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk ikut membawa perdamaian bagi dunia dalam berbagai bentuk, terutama setelah diangkat menjadi Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB selama tahun 1957-1960.

Nasionalis Radikal

Pada masa Pergerakan Nasional, golongan nasionalis dibedakan menjadi dua kelompok, yakni nasionalis lunak atau nasionalis evolusioner dan nasionalis radikal atau disebut juga nasionalis revolusioner. Kaum nasionalis radikal ingin menjebol sampai ke akar-akar (*radix* = akar). Dalam menghadapi kolonialisme dan kapitalisme, kaum nasionalis radikal tidak mau berkompromi. Tidak mau bekerja

5 Istilah "penyerahan kedaulatan" ditafsirkan oleh pihak Indonesia sebagai pengakuan kedaulatan.

sama. Mereka ingin mengambil sikap non kooperasi. Mereka berpendapat, kita tidak mungkin mencapai kemerdekaan lewat kerjasama dengan Belanda seperti yang dianut pengikut politik asosiasi dari golongan nasionalis evolusioner. Antara penjajah dengan terjajah, terdapat dua kepentingan yang tidak dapat dikompromikan. Itu sebabnya kolonialisme Belanda harus ditumbangkan melalui perjuangan. Post kemerdekaan, kaum nasionalis radikal berusaha mempertahankan citranya, yakni masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang berkeadilan sosial. Pola pemikiran politik mereka selalu memihak kepada golongan rakyat kecil, petani, buruh, pegawai, nelayan. Kelompok masyarakat kecil yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia ini harus ditingkatkan kehidupannya agar mereka hidup layak sebagai manusia yang berbudi dan ber-Tuhan. Golongan nasionalis radikal antisistem kapitalisme karena sistem ekonomi yang demikian akan membawa kemelaratan kepada rakyat kecil, sedang di pihak lain akan menumbuhkan kekuasaan kaum kapitalis di bidang politik dan ekonomi. Sistem ekonomi yang demikian jelas bertentangan dengan cita-cita proklamasi, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai seorang nasionalis radikal, Ali menghabiskan sebagian besar hidupnya di panggung politik. Ia termasuk seorang di antara beberapa pemain politik terkemuka di Indonesia. Sejak tahun 1928, sekembalinya dari negeri Belanda, ia memilih PNI sebagai partai politiknya.

Untuk pertama kali Ali dipilih menjadi anggota pengurus PNI cabang Yogyakarta tahun 1928. Dalam Kongres PNI II di Madiun tanggal 3-5 Maret 1947, ia dipilih sebagai Ketua Departemen Politik. Dengan jabatan itulah ia memulai karirnya sebagai seorang diplomat atas nama PNI. Ali kemudian menjadi Ketua Umum PNI yang paling lama sejak partai ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 sampai difusikan dalam PDI pada tanggal 10 Januari 1973. Ia dipilih sebagai Ketua Umum PNI pada Kongres PNI IX di Solo, yang diselenggarakan pada tanggal 25-29 Juni 1960. Ia dipilih lagi dalam kongres berikutnya di Purwokerto pada tanggal 28 Agustus - 1 September 1963.

Jabatan ini terus dipegangnya sampai Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI tanggal 21-27 April 1966 di Bandung, yang memilih Osa Maliki sebagai Ketua Umum DPP-PNI yang baru.

PNI/Front Marhaenis berkembang pesat di masa kepemimpinan Ali dan kawan-kawannya, walaupun pada akhir kepemimpinannya mereka jugalah PNI mulai rontok dari dalam. Sesudah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, akumulasi kekuasaan mulai mengarah ke pundak Pemimpin Besar Revolusi, sekalipun sampai kejatuhannya masih tetap terlihat celah-celah demokrasi yang tersisa untuk kelompok sosial dan politik di Indonesia. Pemimpin Besar Revolusi (PBR)/Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dengan mengumandangkan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 membawa seluruh bangsa Indonesia ke dalam suasana radikal revolusioner. Progresif-revolusioner ketika itu diarahkan ke blok Timur dengan semboyan poros Jakarta-Hanoi-Peking. Keadaan kita ketika itu memaksakan haluan politik yang demikian. Untuk menyukseskan Trikora dan kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, kita mendapat bantuan penuh dari pihak komunis, baik berupa uang, senjata, teknologi ataupun diplomasi internasional. Sebaliknya, mereka menuntut imbalan yakni memberi peluang PKI berkembang di Indonesia. PKI tidak boleh dimusuhi Pemerintah, bahkan harus diberi kesempatan untuk ikut dalam pemerintahan, yang sebelum Dekrit 5 Juli 1959 tidak pernah masuk dalam pemerintahan.

Bung Karno mengumandangkan konsepsi Nasakom sebagai konsepsi politik untuk mempersatukan seluruh kekuatan sosial-politik dan bangsa Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan Trikora. PKI yang memiliki dana cukup besar, baik dari anggota maupun mungkin dari Peking dan lain-lainnya, berkembang dengan pesat, dan tampil sebagai partai yang paling progresif-revolusioner. Dalam situasi yang demikian, Ali dan PNI-nya tidak mau kalah progresif-revolusioner dengan PKI. Sebagai Ketua Umum PNI, Ali ingin membawa PNI melaju ke depan melebihi PKI. Di mana-mana, di seluruh pelosok tanah air, gemuruh "Marhaen Menang" bergema. Gambar kepala banteng di atas

dasar merah-putih terdapat mulai dari daerah perkotaan sampai ke kampung terpencil, di lembah, bukit, sampai lereng-lereng gunung.

Konsepsi politik Nasakom dan Manipol mewarnai seluruh bangsa Indonesia. Semua kelompok sosial-politik menerimanya, termasuk ABRI. Ajaran Marxisme diberikan dalam indoktrinasi-indoktrinasi dan kursus kader revolusi sebagai ilmu masyarakat, di samping falsafah negara Pancasila. Pengetahuan akan Marxisme seolah-olah menjadi prestise tersendiri di kalangan kaum intelektual. Dalam situasi inilah Marxisme memasuki rumusan Marhaenisme. Marhaenisme ditafsirkan sebagai Marxisme yang diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia. Tafsiran ini justru membawa kontradiksi di kalangan DPP-PNI, yakni Ali dan kawan-kawan. Penerapan terhadap konsepsi Nasakom pun berbeda-beda di kalangan PNI. Di Jawa Tengah, PNI/FM berhadapan dengan PKI dan ormas-ormasnya. Terjadi bentrokan berkali-kali antara Pemuda Rakyat/PKI dengan Pemuda Marhaenis/PNI, sementara di Pusat berlangsung semacam "kawin paksa".

Ada yang mengatakan bahwa hubungan DPP-PNI dengan CC-PKI begitu erat karena pengaruh Ir. Surachman terhadap Ali. Sebelum Surachman menjabat Sekjen DPP-PNI, ia menjabat Sekjen DPP-Petani (Persatuan Tani Nasional Indonesia). Ketua Umumnya Sadjarwo SH (sekarang Dekan Fakultas Hukum Universitas Tujuhbelas Agustus, Jakarta) pernah memperingatkan Ali agar berhati-hati terhadap Surachman karena indikasi PKI. Namun Ali sudah terlanjur memberi kepercayaan kepada Surachman sehingga sulit menerima informasi teman.⁶ Pihak lain mengatakan, Ali sendiri tidak mau ketinggalan dengan PKI dalam melaksanakan konsepsi Nasakom dari Presiden Soekarno/PBR/Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Di samping sebagai Wakil Ketua MPRS, Ali juga berkedudukan sebagai Menko (Menteri Koordinator) yang secara struktural harus menjalankan konsepsi Presiden Soekarno. Namun ia pun sadar, persatuan dan kesatuan nasional yang dikuman-

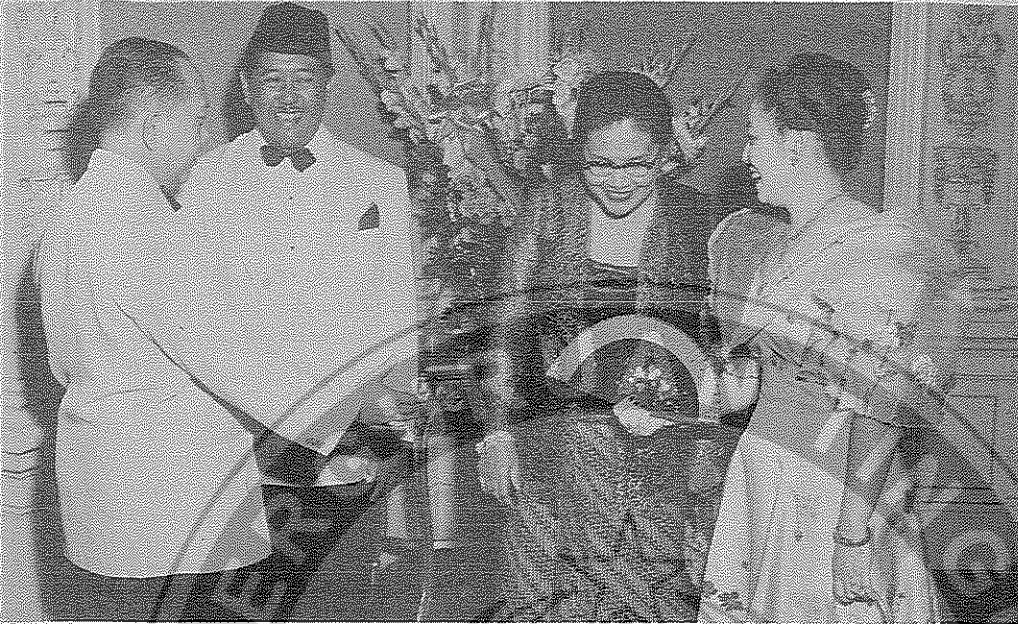
dangkan ketika itu mutlak kehadirannya karena kita ingin menyukseskan perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kariernya sebagai seorang diplomat dan sebagai Perdana Menteri, ia telah berusaha dengan gigih untuk melepaskan Irian Barat dari genggaman Belanda. Ketika itu Ali berpendapat, persatuan dan kesatuan nasional mutlak diperlukan, bukan karena untuk menyukseskan konsepsi Presiden Soekarno semata-mata, melainkan untuk perjuangan bangsa.

Bagaimanapun perlunya persatuan dan kesatuan itu, tampaknya Ali sendiri tidak percaya kepada PKI. Ia menyimpan setumpuk pengalaman pahit dengan PKI. Penangkapannya di negeri Belanda dan dihadapkan ke pengadilan kolonial Belanda, sebenarnya merupakan ekor dari pemberontakan PKI tahun 1926/1927 di Indonesia. Ketika Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, Ali yang ketika itu menjabat Menteri P.P. dan K., menyaksikan sendiri begitu banyak tokoh-tokoh Masyumi dan dari partainya sendiri, PNI, dibantai oleh pengikut-pengikut Musso. Anaknya, Kemal Mahisa⁷, sebagai komandan polisi, disergap bersama anak buahnya di desa Andong, Boyolali, dan selanjutnya dimasukkan di penjara Pati sekitar 40 hari lamanya. Jiwanya hanya bisa diselamatkan dengan masuknya pasukan divisi Siliwangi ke Pati pimpinan Kolonel Kemal Idris.

Ali juga memiliki deretan pengalaman yang panjang dengan golongan Islam "fundamentalis" dan pihak TNI-AD. Ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri (1953-1955 dan 1956/1957) muncul berbagai pergolakan dan pemberontakan. Pemberontakan DI/TII, di Jawa Barat pimpinan Sekarmadji Kartosuwirjo, di Aceh pimpinan Tengku Daud Beureuh, di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar, di Kalimantan Selatan pimpinan Ibnu Hajar harus dihadapi pemerintah. Ali sendiri seorang penganut Islam, namun bila orang membedakan Islam santri dan Islam abangan, tampaknya akan lebih tepat jika ia digolongkan pada kategori kedua ini. Ia dicap sebagai orang yang memberi hati kepada komunis, meskipun tidak

6 Wawancara dengan Sadjarwo SH, tanggal 23 Februari 1983.

7 Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hal. 233.



P.M. Ali Sastroamidjojo bersama nyonya, menerima Carlos Romulo dan isteri.

ada orang komunis atau yang berbau komunis dalam kabinetnya. Ia juga dicap sebagai "Jawasentris", mengutamakan pembangunan di Jawa sehingga daerah-daerah lainnya terbelengkalai.

Dengan alasan-alasan itu dan beberapa kasus lainnya, beberapa perwira melancarkan penyelundupan dan memimpin pemberontakan dalam wajah PRRI/Permesta. Pengalaman pahit itu rupa-rupanya menjadi kerangkeng besi bagi Ali dalam mengambil suatu keputusan politik, baik sebelum pemberontakan, G.30.S maupun sesudah pemberontakan. Ia sudah dihadapkan dengan kenyataan pemberontakan PKI, tapi ia masih tetap ragu terhadap kelompok fundamentalis dan kelompok perwira TNI-AD sesuai dengan pengalamannya. Kejadian-kejadian beruntun yang menimpa PNI sejak tahun 1966 dan membawa nasib malang bagi PNI sampai "dikuburkan" tahun 1973, masih sempat disaksikan oleh Ali. Rupanya ia menyadari bahwa keraguannya itu bukannya tanpa alasan dan tanpa bukti. Hanya, bagaimanapun latar belakangnya, tidak dapat diingkari bahwa PNI dibawah pimpinan Ketua Umumnya Ali Sastroamidjojo telah berjalan seiring dengan PKI di tingkat Pusat (CC-PKI), yang

dikemudian hari PKI berontak terhadap Negara yang berazaskan Pancasila.

Liku-likunya Memerintah

Ali Sastroamidjojo dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1903 di Grabag, lereng Merbabu, 20 km dari Magelang, sebagai anak pensiunan Wedana. Ayahnya bernama R.Ng. Sastroamidjojo, berasal dari Banyumas, anak dari R. Wirjodipuro, seorang wedana pula. Raden Ngabei Sastroamidjojo semula *magang* (pembantu) pada kantor Bupati Magelang, Raden Tumenggung Ario Danuningrat II. Keuletan dan kerajinannya membuat ia mendapat kepercayaan bupati dan diangkat menjadi jurutulis. Kepercayaan yang paling besar diperolehnya ketika sang bupati mengawinkan putrinya, Kustiah, dengan jurutulis yang dipercaya ini, yang selanjutnya diangkat menjadi wedana di Jetis, Tumenggung. Dari perkawinan itu lahirlah enam putra dan enam putri, di antaranya R. Tohar, Dr. Seno Sastroamidjojo, Sriyati Sastroamidjojo, Ali Sastroamidjojo dan Usman Sastroamidjojo.

Di antara mereka, yang berhasil mewarisi sang ayah untuk memerintah ialah Ali Sas-

troamidjojo. Ia termasuk seorang Indonesia yang sangat beruntung dalam meniti karier. Sebagai politikus dan pimpinan partai, ia berhasil menjabat Ketua Umum DPP-PNI dalam tenggang waktu yang paling lama kalau dibandingkan dengan Ketua Umum PNI lainnya. Ia juga mendapat kesempatan besar untuk mengembangkan kariernya sebagai seorang diplomat tersohor. Sejak tahun 1945 ia tetap bergerak di bidang eksekutif dan legislatif sampai tahun 1966.

Pada kabinet pertama, kabinet presidensial yang dibentuk Bung Karno, Ali diangkat sebagai Wakil Menteri Penerangan. Waktu itu, yang menjadi Menteri Penerangan adalah Amir Syarifuddin. Jabatannya ini berlangsung singkat saja yakni dari 19 Agustus — 14 November 1945. Kemudian ia diangkat lagi sebagai Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan II (3 Juli 1947 — 11 November 1947 dan 11 November 1947 — 29 Januari 1948). Kabinet berikutnya ialah kabinet presidensial pimpinan Wakil Presiden Bung Hatta, berlangsung dari 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Dalam Kabinet Hatta ini Ali diangkat lagi sebagai Menteri P.P. dan K.

Dalam kedudukannya sebagai Wakil Menteri Penerangan maupun sebagai Menteri Pengajaran/Menteri P.P. dan K, Ali tidak dapat berbuat banyak karena waktu kerja kabinet yang terlalu singkat, ditambah dengan buruknya situasi di masa revolusi, yang justru menyibukkan Ali pada kegiatan-kegiatan diplomasi.

Tampaknya pengalaman di bidang eksekutif menyadarkan Ali bahwa pemerintahan yang stabil sangat diperlukan sebagai syarat untuk melaksanakan pembangunan. Itulah sebabnya, ketika mendapat kesempatan memimpin kabinet, ia berusaha keras menciptakan suatu pemerintahan yang stabil. Kabinet Ali I merupakan kabinet yang paling lama. Kabinet ini berlangsung lebih dari dua tahun yakni dari tanggal 30 Juli 1953 sampai tanggal 12 Agustus 1955. Ketika kabinet ini dibentuk oleh formaturnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya), Ali sendiri masih menjabat sebagai duta besar di Washington. Jabatan ini diperolehnya atas keinginan Sidik Djojokusarto, Ketua Umum PNI ketika itu, yang dikenal sebagai seorang

tokoh partai yang tidak menginginkan kekuasaan.

Apabila kita membolak-balik program kabinet sejak proklamasi, kita akan mencatat bahwa program Kabinet Ali I ini yang paling padat. Banyak yang mau Ali kerjakan bersama kawan-kawannya. Mereka mau membangun untuk kepentingan rakyat jelata seperti petani, buruh, pegawai, nelayan dan untuk kepentingan para penganggur serta lain-lainnya. Namun, menurut Ali, kabinet memberikan prioritas pada soal keamanan, pemilihan umum, dan persoalan-persoalan luar negeri.⁸

Soal keamanan ini sangat mendesak karena kabinet yang muda itu segera dihadapkan pada pemberontakan Daud Beureueh tanggal 19 September 1953, yang menambah beban pemerintahan dalam usahanya menciptakan keamanan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Beruntung bahwa hanya dalam waktu sebulan kaum pemberontak pimpinan Daud Beureueh sudah berhasil didesak dari kota ke hutan-hutan sehingga tidak membawa malapetaka yang berlanjut kepada rakyat di kota.⁹ Ali juga berusaha keras mengatasi perpecahan yang timbul di kalangan TNI akibat pro dan kontra Peristiwa 17 Oktober 1952.

Untuk sementara situasi tegang dapat dipendam melalui rapat para perwira di Yogya. Ini memberi kesempatan pada Kabinet Ali untuk memusatkan perhatian pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika dan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum. Panitia Pemilihan Pusat yang diketuai Hadikusumo sudah menetapkan Pemilu jatuh pada tanggal 29 September 1955 untuk DPR, dan 15 Desember 1955 untuk Konstituante. Namun tidak terselesaikannya persoalan dalam tubuh TNI-AD menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali I. Kol. Zulkifli Lubis dan kawan-kawan menentang keras Kolonel Bambang Utoyo yang diangkat sebagai KASAD. Kabinet kehilangan muka. NU yang berkoalisi dengan PNI dalam kabinet mendesak supaya kabinet dibubarkan. Ali terpaksa membubarkan kabinetnya. Suatu pengalaman pahit bagi Pak Ali kita ini. Dan pengalaman itu masih berulang lagi pada Kabinet Ali II. Kol. Lubis,

⁸ *Ibid.*, hal. 308.

⁹ *Ibid.*, hal. 317.

Kol. Simbolon, Kol. Kawilarang, Letkol Warrouw, menolak mutasi-mutasi yang dilakukan Mayor Jenderal A.H. Nasution. Muncul gerakan-gerakan untuk melancarkan kudeta di Jakarta. Penangkapan terhadap Roeslan Abdulgani, Menteri Luar Negeri ketika itu, dengan tuduhan korupsi, berbagai penyelundupan di daerah, pembentukan Dewan Banteng, Dewan Garuda, Dewan Gajah, ternyata bermuara di pemberontakan PRRI/Permesta.¹⁰

Kabinet Ali II yang berlangsung setahun, didukung tiga partai yang menduduki tempat teratas dalam Pemilihan Umum tahun 1955 yakni PNI, Masyumi dan NU. Menurut cerita Pak Ali, Presiden Soekarno menghendaki supaya PKI dimasukkan juga dalam kabinet sebagai partai yang menduduki tempat keempat dalam Pemilihan Umum. Formatur kabinet, Ali Sastroamidjojo tidak dapat memenuhi permintaan itu karena ditolak partner koalisi, terutama Masyumi dan NU.

Suatu hal yang baru ialah bahwa kabinet ini untuk pertama kali dalam sejarah republik mengadakan perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah membentuk suatu badan perancang pembangunan jangka panjang yang disebut Biro Perancang Negara di bawah pimpinan Ir. Juanda. Biro ini, yang kemudian berubah menjadi BAPPENAS, menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1961). Sekalipun Kabinet Ali II ini hanya berlangsung setahun, namun Rencana Pembangunan Lima Tahun dengan revisi masih tetap dilaksanakan kabinet berikutnya dalam pimpinan Ir. Juanda.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Rencana Pembangunan Lima Tahun tersebut, ditetapkan bahwa tujuan pembangunan nasional ialah "mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial, sesuai dengan azas kekeluargaan"¹¹ Ketika pola politik ekonomi dibawa ke DPR, tidak mendapat tantangan yang berarti, karena Masyumi dan NU yang menjadi partner koalisi turut mendukungnya.

Dalam otobiografinya, *Tonggak-tonggak*

Di Perjalananku, Ali Sastroamidjojo mengungkapkan, politik ekonomi pada Kabinet Ali II sebenarnya sama dengan politik ekonomi pada Kabinet Ali I. Kalau pada Kabinet Ali II, kebijaksanaan ekonomi yang demikian mendapat dukungan sepenuhnya dari Masyumi, maka pada Kabinet Ali I, pola politik ekonomi tersebut justru Masyumi yang ketika itu menjadi oposisi yang menentang keras. Tentangan dari Masyumi tersebut dialamatkan kepada Menteri Perekonomian pada Kabinet Ali I ialah Iskaq Tjokrohadi-surjo. Akibatnya, Iskaq terpaksa diganti dengan Prof. Ir. Rooseno untuk mengurangi oposisi yang berlanjut dalam Parlemen.

Menurut Pak Ali, proses "Indonesianisasi" yang dilancarkan oleh Iskaq begitu cepat sehingga pada bulan November 1954, setahun sesudah Iskaq menjabat Menteri Perekonomian, jumlah perusahaan impor pribumi di seluruh Indonesia sudah mencapai sekitar dua ribu buah, atau kira-kira 8 kali lebih banyak daripada jumlah di akhir tahun 1950, yang hanya 250 buah. Demikian pula perkembangan bank nasional. Pada pertengahan tahun 1953 bank-bank swasta nasional sudah berjumlah 20 buah. Perkembangan ini dimungkinkan oleh adanya kredit dari Bank Indonesia bagi mereka yang ingin mendirikan bank swasta nasional. Perusahaan perkapalan juga menanjak maju karena mendapat kredit dari bank-bank Pemerintah.

Ali menyatakan, kebijaksanaan politik ekonomi ketika itu membawa perbaikan-perbaikan di bidang sosial ekonomi. Dalam dua tahun, produksi beras dapat ditingkatkan sehingga andaikata tidak ada gangguan banjir di Jawa Barat dan Jawa Tengah, swasembada beras mungkin sekali akan tercapai. Pemerintah memang berhasil menciptakan stabilisasi harga beras dengan Rp. 1,85 per liter di daerah-daerah, dan Rp. 2,85 per liter di Jakarta. Rendah dan stabilnya harga beras itu mempengaruhi kebutuhan pokok lainnya pada tingkat harga yang relatif rendah, kecuali tekstil agak sedikit tinggi. Harga yang rendah dan stabil itu dapat dijangkau masyarakat sehingga menurut Pak Ali, ketika itu tidak terdengar keluhan kesah dari pihak buruh dan pegawai negeri mengenai tingkat gajinya yang rendah.¹²

10 *Ibid.*, hal. 353-372

11 *Ibid.*, hal. 351.

12 *Ibid.*, hal. 336.

Kalau dibandingkan antara Kabinet Ali I dengan Kabinet Ali II, Kabinet Ali I lebih berhasil dalam pembangunan ekonominya. Mungkin karena kesempatan kerja bagi Kabinet Ali II sangat singkat (setahun) dibandingkan dengan dua tahun untuk Kabinet Ali I, di samping kondisi kerja kabinet yang kurang menguntungkan merupakan faktor yang paling menentukan. Meskipun Kabinet Ali II atau Kabinet Ali Roem-Idham didukung oleh tiga kekuatan partai terbesar post Pemilihan Umum yakni PNI, Masyumi dan NU, namun persoalan-persoalan dan kemelut yang berantai di kalangan TNI, khususnya Angkatan Darat, banyak menyita pikiran dan waktu dari Pemerintah.

Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, Kolonel A.H. Nasution diangkat lagi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dan pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Dalam Kabinet Ali II, Kasad, A.H. Nasution melancarkan *tour of duty*. Kebijakananaan Nasution mendapat tentangan keras, terutama dari para perwira yang terkena mutasi itu. Menurut rencana, Kol. M. Simbolon, Panglima Divisi Bukit Barisan, Sumatera Utara diganti oleh Wakil Kasad, Kol. Zulkifli Lubis, yang sangat menentang Ali dalam kabinetnya yang pertama. Ini menyebabkan A.H. Nasution dituduh sebagai antek Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, tokoh politik suku Jawa. Kejasama Ali-Nasution (Pusat, Jawa) ditujukan kepada penyingkiran Simbolon-Lubis (Sumatera).¹³

Kelompok Simbolon-Lubis mendapat dukungan kuat dari Kol. Kawilarang, Panglima Divisi Siliwangi yang diganti dengan Letkol Suprayogi. Kelompok perwira tersebut dengan alibi melakukan penangkapan terhadap Menteri Luar Negeri, Roeslan Abdulgani, pada tanggal 13 Agustus 1956 atas tuduhan korupsi, hendak menggagalkan serah terima jabatan yang direncanakan esok harinya. Ali sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ad interim menginstruksikan Kasad, A.H. Nasution membatalkan penangkapan terhadap Roeslan Abdulgani yang akan berangkat ke London menghadiri konperensi masalah terusan Suez. Pasukan yang diperintahkan Nasution berhasil. Upacara serah-terima dari Kol. Kawilarang kepada Letkol

Suprayogi dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana. Kol. Lubis yang diketahui sebagai otak di belakang gerakan Kawilarang, meletakkan jabatan sebagai Wakil Kasad pada tanggal 20 Agustus. Dua hari kemudian, Letkol J.F. Warrouw, Panglima T.T.VII, yang akan diganti Letkol Vence Sumual meletakkan jabatannya sebagai tanda kesetia-kawanan terhadap Kol. Lubis. Ulah selanjutnya dari kelompok Lubis ialah usaha kudeta yang dilancarkan pada tanggal 11 Oktober 1956. Kekuatan pasukan sebanyak 9 batalyon dikerahkan dari Cirebon dan Tasikmalaya menuju Jakarta. Pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor Achmad Wiranatakusumah berhasil menghentikan gerakan pasukan ini tanpa pertempuran di Bogor. Usaha Kol. Lubis dan kelompoknya bukan berarti berhenti karena kegagalan ini. Pada tanggal 16 November, Mayor Juhro Sumitradilaga, Komandan Jakarta Raya, diinstruksikan untuk menangkap Kasad, Mayor Jenderal A.H. Nasution. Resimen IX dari Divisi Siliwangi dan pasukan kavaleri RPKAD dari Batujajar, dekat Bandung, dibawah pimpinan Mayor Jaelani akan memperkuat pasukan Juhro untuk menangkap para menteri dan beberapa pimpinan parpol.

Rencana kudeta ini pun berhasil digagalkan Mayor Jenderal Suprayogi, Panglima Divisi Siliwangi yang mencium rencana kudeta tersebut. Perwira-perwira yang terlibat dalam rencana kudeta itu ditahan, seperti Mayor Juhro, Kol. Sukanda Bratameng-gala, Kol. Sapari, Mayor Saleh Sadeli dan Kapten Zainal Arifin. Kol. Lubis yang tetap menyembunyikan diri, diberhentikan sementara dari TNI, dan dibatalkan pengangkatannya sebagai Panglima Bukit Barisan.

Tindakan pemerintahan Ali Sastroamidjojo yang tegas tersebut disambut dengan usaha-usaha pengambilalihan kekuasaan dari pemerintahan sipil di Sumatera. Pada tanggal 22 Desember, melalui corong RRI Medan Kol. Simbolon mengumumkan pernyataannya sebagai berikut: Melepaskan hubungan untuk sementara dari Pemerintah Pusat; Mulai tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi mengakui kabinet yang sekarang; Mulai tanggal 22 Desember 1956 mengambil kembali pemerintahan di wilayah Tentara dan Territorium I.

13 *Ibid.*, hal. 354.

Pada tanggal yang sama Kabinet Ali II mengambil tindakan, yang memberhentikan untuk sementara Kol. Simbolon dari jabatannya sebagai Panglima T.T.I. Di samping gejala yang ditimbulkan Simbolon, di Padang pun Letkol. Ahmad Husein mengambil alih kekuasaan di Sumatera Tengah. Di Sumatera Selatan, dengan cara yang agak diplomatis, Letkol Barlian juga mengambil alih kekuasaan dari Gubernur Sumatera Selatan.

Pemerintahan Ali menghadapi kesulitan karena tidak memiliki satu bahasa dalam mengambil sikap terhadap Ahmad Husein dengan Dewan Bantengnya dan Simbolon dengan Dewan Gajahnya. IPKI menarik menteri dari kabinet, yang kemudian disusul Masyumi tanggal 9 Januari 1957. Kabinet Ali II mengalami krisis. Dalam situasi demikian, Letkol Vence Sumual muncul lagi dengan Dewan Manguni-nya pada tanggal 8 Februari 1958, yang kemudian disusul dengan proklamasi bahwa seluruh daerah kekuasaannya yakni Territorium Tentara VII, Indonesia Timur, dinyatakan dalam keadaan SOB. Pemerintahan Kabinet Ali II yang penuh dengan gejala pun berakhir. Ali sendiri menyatakan, faktor utama yang menentukan jatuhnya Kabinet Ali II ialah Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957 yang menghendaki pembentukan kabinet "Gotong Royong" dan pembentukan "Dewan Nasional". Pada tanggal 14 Maret 1957 pagi jam 10.00, Ali mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Hadir pada kesempatan itu tiga Kepala Staf, yakni Mayor Jenderal Nasution, Komodor Suryadarma dan Laksamana Subyaktio, di samping Jaksa Agung Suprpto, dan Ketua Mahkamah Agung Wiryono Projodikoro. Ali bersama kabinetnya menyatakan demisioner. Negara yang berada dalam keadaan berbahaya dan gawat, dinyatakan dalam keadaan SOB untuk seluruh Indonesia.¹⁴ Bola kekuasaan Indonesia bergulir turun dari tangan parpol ke tangan golongan fungsional dan ABRI. Jatuhnya kekuasaan Ali Sastroamidjojo sekaligus mengakhiri kekuasaan partai politik sejak proklamasi,

dan mengawali pertumbuhan kekuasaan golongan fungsional.

Wakil Rakyat yang Disamakan dengan Menko

Sejak lebih dari seribu tahun lalu, bangsa Indonesia berkenalan dengan feodalisme raja-raja despotik. Raja-raja dewa itu kemudian dilingkari sarang birokrasi yang menjadi benteng akumulasi kekuasaan seorang raja. Rakyat diperlakukan sebagai "kawula", manusia semi budak yang menyembah dan mempersembahkan kultusnya kepada sang raja.

Setelah berada pada babak kehidupan bangsa yang disebut "seberang jembatan emas" proklamasi, kita mencari-cari demokrasi yang cocok untuk masa depan bangsa Indonesia. Orang lalu terlena dengan masa lalu. Feodalisme despotik mengalami semacam *renaissance*. Reuni dengan sistem kekuasaan despotik.

Sejak Dekrit 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 hendak dilaksanakan secara murni. Kenyataannya lain. Dekrit itu sendiri mengalirkan kekuasaan yang berlebihan kepada Presiden, lebih daripada apa yang dikehendaki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembubaran Konstituante, lenyapnya UUDS, berlakunya lagi UUD 1945 dan pembentukan MPRS melalui suatu dekret, jelas mengawali akumulasi kekuasaan, meskipun tragedi ini dapat dihindari apabila elite politik kita tidak ber-*renaissance* dengan feodalisme politik masa lalu.

MPRS yang dibentuk kemudian, diharapkan bisa membawa suatu pembaruan bagi demokrasi politik sesuai dengan UUD 1945. Apa yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Kelompok elit politik ini ikut dalam arus akumulasi kekuasaan di satu tangan. Renaissance terhadap feodalisme despotik dengan birokrasi sarang laba-labanya berjalan terus.

Salah seorang di antara elit politik yang ikut menentukan sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah Ali Sastroamidjojo. Sebagai Ketua Umum DPP-PNI yang dipilih dalam Kongres PNI IX di Solo, ia diangkat menjadi Wakil Ketua MPRS. Wakil Ketua MPRS yang lain ialah: K.H. Idham Chalid dari NU, D.N.

14 *Ibid*, hal. 375.

Aidit dari PKI, dan Brigjen Wiluyo Puspyudo dari ABRI. Wakil Ketua MPRS itu bersama Wakil Ketua DPR-GR berkedudukan sebagai Menteri. Ketua MPRS, Chairul Saleh, bersama Ketua DPRGR, Ketua DPA dan Ketua DEPERNAS (Dewan Perancang Nasional) berkedudukan sebagai Wakil Menteri-Pertama.

Pimpinan Wakil Rakyat yang berkedudukan sebagai Menteri ini dicantumkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94/1962, tanggal 6 Maret 1962, tentang Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 November 1963). Dalam Kabinet Kerja IV yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden No. 282/63 tanggal 13 November 1963, Ali Sastroamidjojo sebagai Wakil Ketua MPRS, disamakan lagi kedudukannya sebagai Menteri. Sedang dalam Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964-28 Maret 1966), Ali Sastroamidjojo dan teman-temannya yang menjabat Wakil Ketua MPRS disamakan kedudukannya sebagai Menteri Koordinator. Ketua MPRS, Chairul Saleh berkedudukan sebagai Wakil Perdana Menteri. Tingkah-laku politik yang demikian akan menimbun seluruh kekuasaan negara dalam sektor eksekutif. Montesquieu yang memisahkan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan yudikatif dengan tugas dan wewenang yang berbeda, tidak bisa diterapkan di sini. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kepada MPR/DPR hak dan wewenang pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara, tetapi ternyata tidak dapat dilakukan. Pimpinan MPRS, dan Pimpinan DPR-GR, yang berstatus sebagai Menteri, dalam hirarki eksekutif, berada di bawah kekuasaan Presiden/Perdana Menteri sebagai pembantu.

Tidak mengherankan kalau produksi-produksi legislatif itu umumnya menunjukkan hasil-hasil banci. Ketetapan-ketetapan MPR antara tahun 1960 sampai tahun 1965 menempatkan pidato-pidato Presiden sebagai pedoman-pedoman politik dalam kegiatan bernegara. Penetapan-Penetapan Presiden dan pidato Presiden dijadikan sumber hukum. Tap. No. 1/MPRS/1960 mengangkat Manifesto Politik Republik Indonesia, pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959, sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Tap. No.

2/MPRS/1960 di samping menetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, juga melahirkan gelar Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Tap. No. 3/MPRS/1963 menetapkan Dr. Ir. Soekarno, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia menjadi "Presiden Republik Indonesia seumur hidup". Tap. No. 4/MPRS/1963 menetapkan pidato Presiden yang berjudul "Resopim" dan "Takem" dijadikan pedoman pelaksanaan Manipol, sedang pidato yang berjudul "Deklarasi Ekonomi" dijadikan pedoman pelaksanaan garis-garis haluan pembangunan di bidang ekonomi. Ketetapan MPRS ini juga menetapkan pidato "Ambeg Parama Arta" sebagai landasan kerja dalam pelaksanaan konsepsi pembangunan, seperti yang terkandung dalam Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960. Pidato Presiden Soekarno yang berjudul "Berdikari", dijadikan pedoman pelaksanaan haluan negara, Manipol, dan diterima tanpa *reserve*. Pidato Presiden lainnya yang juga dijadikan pedoman pelaksanaan Manipol ialah: "Gesuri", "Tavip", *The Fifth freedom is our weapon* dan *The era of confrontation*, sesuai dengan Tap. No. 7/MPRS/65. Demikianlah kita saksikan suatu panorama politik yang tidak terpuji karena menunjukkan lemahnya wibawa dan wewenang lembaga negara tertinggi ini.

Kerakyatan, Ulet dan Sederhana

Sebagai seorang diplomat, seorang Perdana Menteri, dan Ketua Konferensi Asia-Afrika, Ali Sastroamidjojo pernah berdialog, bergaul dan bahkan mengunjungi tempat kediaman beberapa tokoh dunia sezamannya. Ia menceritakan kesederhanaan beberapa tokoh dunia yang dikunjungnya seperti: Gamal Abdel Nasser, Josif Bros Tito, Khrushchev, Mao Zedong, Chou En Lai, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi dan lain-lain.

Ceritanya tentang pertemuan dengan Fidel Castro yang nyentrik itu cukup menarik. Ia seakan-akan diplomasi oleh pahlawan besar Kuba tersebut. Ali bersama isterinya, Titi Rulia, dan seorang stafnya bernama Masfar yang tiba di Havana pada tanggal 16 Desember 1957, dibawa pergi menempuh suatu perjalanan malam yang menyita waktu berjam-jam: Mereka menggunakan pakaian per-

juangan para gerilyawan dari Castro dan pengikut-pengikutnya ketika menentang rezim Batista. Tempat persembunyian Castro yang terletak di suatu "pulau-danau" terpencil di masa gerilya, menjadi sasaran dari perjalanan panjang dengan kendaraan mobil dan perahu motor. Ketika hendak makan siang, ternyata tak ada lauk sehingga Fidel Castro mengajak Ali mengayuh perahu memancing ikan. Jadilah makan siang itu dengan nasi dan ikan goreng tanpa perlengkapan sendok dan garpu.

Tampaknya pemimpin urakan dari Kuba, yang jadi Perdana Menteri itu, sudah menyelami sedikit tentang tamunya yang bekas Perdana Menteri, Ketua Konferensi Asia-Afrika, dan seorang politikus dari partai nasionalis yang berjuang untuk kaum Marhaen. Karena itu Castro menyatakan pada Ali bahwa dia bukan seorang komunis melainkan seorang nasionalis yang berjuang untuk kepentingan rakyat Kuba dan menghilangkan pengaruh yang sudah mendalam Amerika Serikat di negerinya. Ia hendak menunjukkan kepada Ali bagaimana kehidupannya sebagai seorang pejuang di tengah-tengah rakyat.

Apa yang dikisahkan Ali tentang kesederhanaan tokoh-tokoh dunia itu dalam otobiografinya, pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kehidupannya sendiri dalam keluarga. Kesederhanaan Ali tampaknya diwariskan pada dua puteranya yang masih hidup yakni Kemal Mahisa dan Karna Rajasa.

Pernah Karna Rajasa suami-isteri menraktir penulis makan pecel dari pedagang keliling di Kampus Universitas Tujuhbelas Agustus, Jakarta. Pecel itu digendong oleh seorang mbok tua yang berkeliling masuk ke luar rumah, atau menyusuri pinggir jalan untuk menjajakan hartanya yang sangat berharga bagi hidup itu. Ketika itu penulis rasanya segan, karena selain memang penulis cukup berpengalaman makan pecel para mbok itu di Salatiga dulu, tapi kurun waktu dua puluhan tahun itu sudah lewat, dan pengetahuan tentang kesehatan bertambah. Namun penulis menjadi malu pada Karna Rajasa dan isterinya karena ternyata bahwa pecel dari mbok itu sudah lama menjadi langganan keluarga Ali. Ketika keluarga Pak Ali masih tinggal di Jalan Krawang No. 4 Menteng,

mbok ini keluar-masuk ke rumah Perdana Menteri untuk menjajakan pecelnya. Ia mengenal seluruh isi rumah Krawang No. 4 lewat pecelnya.

Ali tidak rewel soal makan. Apa adanya, dan sederhana. Ia malah sering mengoreng sendiri sisa nasi malam untuk dimakan. Bahkan ketika menjabat Menteri P.P dan K. di masa revolusi ia pernah *collaps* karena kurang makan. Pakaian sehari-hari pun tetap sederhana, kecuali kalau ia hendak menghadiri suatu resepsi atau upacara.¹⁵

Ketika ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia yang pertama untuk Amerika Serikat, ia berangkat dengan isteri dan ketiga anaknya serta Darmanto dan isteri. Di Washington, teman-temannya sudah menyiapkan sambutan dengan sebuah 'flat' mewah di Hotel Shoreham, lengkap dengan ruang tamu, ruang makan, dapur dan perabot rumahtangga, ditambah dua mobil limousine merk Cadillac lengkap dengan supir. Ia merasa ganjil menerima kemewahan itu. Teman-teman itu ditegur dan meminta supaya mobil-mobil yang sudah dibeli untuk kedutaan itu dikembalikan saja karena terbatasnya keuangan. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang ketika itu menjadi orang kedua di kedutaan, menjawab bahwa soal uang tidak perlu dirisaukan karena teman-teman di New York dapat membesarkannya. Lagi pula flat dan mobil yang dianggap Ali mewah itu katanya untuk menjaga gengsi negara.

Ali juga sangat disiplin dalam pekerjaan dan waktu. Menurut Suprapti Sukonto, sekretaris Pak Ali ketika menjabat Perdana Menteri pertama, Pak Ali, yang ketika itu tinggal di Merdeka Selatan 4, rumah dinas untuk Perdana Menteri, selalu bangun pagi-pagi sekali untuk mandi, membaca koran atau hal-hal lain yang harus diselesaikan. Sebagai sekretaris, Suprapti malah bangun kemudian. Katanya, Pak Ali sangat disiplin dengan waktu dan jadwal kerja yang padat. Baik di rumah kediamannya, Merdeka Selatan, ataupun kantor kerjanya di Pejambon, yang sekarang dijadikan kantor BP7, ia banyak menerima tamu. Diceritakannya, biasanya para tamu tidak begitu sulit mene-

¹⁵ Wawancara dengan Karna Rajasa, tanggal 20 Februari 1984.

mui sang Perdana Menteri. Jarak antara Perdana Menteri, para Menteri dengan rakyat terasa dekat. Kantor kerja maupun rumah tinggal tetap menampilkan kesederhanaan seorang Perdana Menteri.¹⁶

Hal yang sama diceritakan juga oleh sekretaris yang lain, yang kini menjadi isteri Karna Rajasa yakni Karimi Rajasa. Kartini mengungkap, watak Pak Ali kerakyatan dan penuh disiplin, karena itu ia juga terkadang mendapat semprot dari Pak Ali.¹⁷ Ketika Ali Sastroamidjojo menjabat Perdana Menteri untuk kali yang kedua dan merangkap Menteri Pertahanan ad interim, ia minta KASAD, A.H. Nasution, untuk datang kepadanya karena sesuatu keperluan. Nasution terlambat 15 menit sehingga ia juga kebagian berangnya Pak Ali.¹⁸

Lain lagi kisah Kurnianingrat, isteri Pak Ali yang kedua, setelah isteri yang pertama meninggal. Ibu Kurnianingrat yang lahir tanggal 4 September 1919, baru untuk pertama kali menikah, yakni dengan Pak Ali pada tahun 1970. Kurnianingrat yang di masa revolusi bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMA, SGA dan SGKP, dan anak didiknya yang antara lain kini dikenal dengan Prof. Dr. Daud Yusuf, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Karna Rajasa MA, mengatakan di masa revolusi dulu rakyat bebas bertemu dengan para pemimpinnya, termasuk Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri. Ia sebagai guru bisa ke Istana dan menemui Bung Karno. Ia mengenal seluruh keluarga Pak Ali. Perkenalan itu yang kemudian membuahkan pernikahan tahun 1970, meskipun sudah berumur 51 tahun.

Katanya, banyak orang memberi kesan, Pak Ali itu kaku, hemat ketawa dan cemberut. Kesan demikian pula tampaknya terbenam di benak pelukis terkenal Affandi, sehingga dia menghadiahkan sebuah lukisan Pak Ali dengan wajah yang merengut. Namun bagi ibu Kurnianingrat, Pak Ali adalah seorang manusia yang penuh humor. Setidak-tidaknya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Katanya lagi kalau ia bersama

Pak Ali ke pasar, banyak orang menyapa dan kadang-kadang menolak pembayaran yang disodorkan Pak Ali. Rakyat kecil di pasar begitu gembira melihat wajah Pak Ali. Itu menunjukkan, demikian Kurnianingrat, Pak Ali tetap di hati rakyat, meskipun ia tidak lagi memiliki jabatan. Ia juga tetap memikirkan nasib rakyat kecil dan mengikuti rapat-rapat dengan teman-temannya sebelum mengidap penyakit paru-paru selama tiga bulan yang sekaligus mengakhiri hidupnya. Karena Pak Ali tidak banyak memikirkan diri sendiri, maka semasa hidupnya ia hanya menerima pensiunan dari Deparlu. Ia tidak mau mengurus pensiunan lainnya. Setelah ia meninggal pada tahun 1975, atas anjuran Pak Diro (Sudiro), pensiunan lainnya itu diurus, seperti dari MPR dan sebagai perintis.¹⁹

Prof. Sunario, teman seperjuangan Pak Ali tetapi lebih senior, menyatakan kenal dengan Pak Ali pada tahun 1924 di negeri Belanda ketika mereka masih sama-sama kuliah di Universitas Leiden. Ketika itu mereka sama-sama melarat di Belanda. Antara tahun 1953-1955, Ali menjabat Perdana Menteri, sementara Sunario sebagai Menlu. Keduanya sama-sama memiliki saham penting dalam Konferensi Asia-Afrika. Cuma dalam menghadapi Pak Ali, Pak Nario mengatakan: *Wah menghadapi Ali, saya repot*. Katanya, pada awal pembentukan kabinet, Sidik Djojokusarto, Ketua Umum DPP-PNI, mengingatkan: *Mas Nario, sing nguti-ati jogo-jogo. Mas Ali koppig, mas Nario sing koppig*. Selama dua tahun, memang tidak ada konflik karena saling tenggang rasa. Diakuinya Ali pintar, jago memimpin sidang, ulet, tahan dalam kesederhanaan, tetapi sulit menerima pikiran teman-teman.²⁰

Tampaknya, watak Ali yang keras, sederhana, ulet dan kerakyatan itu adalah sintesa antara pemilikan geneologis dan faktor psikologis yang berkembang sejak kecil dan selama masa pendidikan. Sebagai anak pensiunan wedana, yang tinggal di kampung, ia terbiasa bergaul dengan anak-anak kampung yang lebih miskin. Ia juga sempat

16 Wawancara dengan Suprapti Sukonto tanggal 23 Februari 1984.

17 Wawancara dengan Kartini Rajasa tanggal 20 Februari 1984

18 Wawancara dengan Karna Rajasa, tanggal 20 Februari 1984.

19 Wawancara dengan Kurnianingrat, tanggal 23 Februari 1984.

20 Wawancara dengan Prof. Sunario tanggal 13 Februari 1984.

bersekolah di sekolah desa bersama anak-anak desa. Untuk kemajuan pendidikan, maka Ali pindah dari desa Grabag ke kota Magelang. Di sana Ali dimasukkan ke ELS II (Sekolah Belanda kelas dua). Diuturkan oleh Ali, ia sangat menderita di sekolah itu karena anak-anak Indo-Belanda di sekolah itu nakal-nakal, apalagi terhadap anak-anak Indonesia yang hanya satu-dua. Itu sebabnya setelah setahun ia bersekolah, ia pun mogok. Tidak mau bersekolah lagi. Dengan usaha yang keras dari ayah, ia diterima lagi di ELS I (Sekolah Belanda Kelas I). Ia dapat diterima di sekolah itu karena masih keluarga dari bupati Magelang. Di sekolah itu terdapat diskriminasi besar antara anak-anak Belanda, Indo-Belanda dengan satu-dua anak Indonesia yang disebut *Inlander*. Pemuda Ali terpaksa menelan segala penghinaan itu dengan kompensasi belajar keras agar tidak kalah dari anak-anak Belanda itu. Di rumah, ia belajar ngaji dan bahasa Jawa. Adat istiadat Jawa juga ditanamkan orang tua sejak kecil sehingga pendidikan Barat tidak menghilangkan kebudayaan Jawa.

Tahun 1918, Ali menyelesaikan *Eerste Europese Lagere School* dan masuk ke HBS di Jakarta karena usaha kakaknya Sastrowijono, anggota *Volksraad* dan kakak lainnya yang sudah lulus STOVIA ialah Dr. Seno

Sastroamidjojo. Di HBS, Ali kekurangan uang. Nilainya yang rata-rata tujuh, menyebabkan ia berhak memperoleh beasiswa. Setamatnya dari HBS, Ali meneruskan studinya ke Belanda dengan beasiswa atas usaha Dr. H. Kraemer yang tinggal di Yogyakarta. Tentu saja beasiswa itu tidak cukup. Ia mendapat pengiriman tambahan dari kakaknya Sastrowijono. Bersama isterinya, Titi Rulia, yang menyusul ke Belanda, mereka hidup sangat sederhana, seiring dengan kesederhanaan dan derita yang dialami teman-teman lainnya di negeri Belanda.

Pengalamannya yang berliku-liku, entah yang ramah maupun yang buas, telah menempa Ali menjadi salah seorang tokoh terkemuka bangsa, dan berada pada barisan terdepan para pejuang Indonesia. Ketika tahun 1975, penulis datang ke Jalan Darmawangsa 4, Kebayoran Baru, Jakarta, dan menyaksikan tubuh yang terbaring tanpa nyawa, penulis yakin bahwa cita-citanya untuk memberi kesejahteraan kepada kaum Marhaen yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia tidak akan musnah begitu saja bersama tubuh yang tak bernyawa. Perjuangan akan berjalan terus, sekalipun di kegelapan malam atau harus menembus badai.



Islam dalam Kultur Hukum Asia Tenggara

M.B. Hooker, *Islamic Law in Southeast Asia*, (Singapore, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1984), 380 hal.

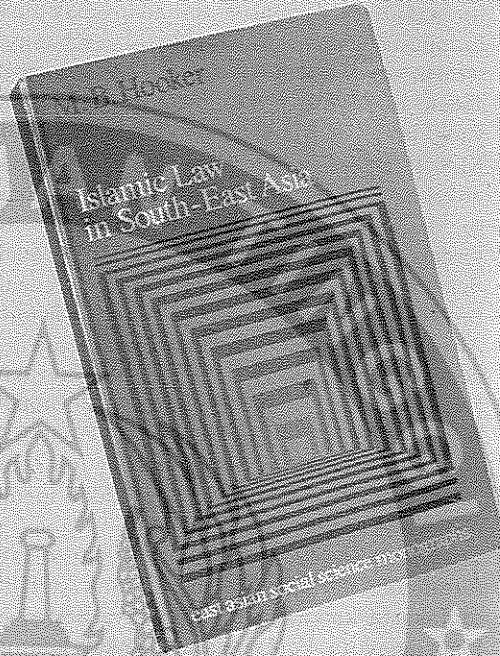
Kaji tentang hukum Islam di sini jarang sekali bersifat historis. Dari kalangan pesantren sampai peringkat perguruan tinggi seperti IAIN, jika membahas syariah, seringkali hanya membahas teks hukum, yang umumnya tak dikaitkan benar dengan konteks sosio-historisnya. Kaji tentang hukum Islam dengan demikian bersifat sangat yuristik—membahas pelik-pelik masalah dari kacamata skolastik hukum. Kaji hukum Islam secara demikian merupakan bagian dari kaji keagamaan yang lebih tinggi, justru karena ciri legalis yang kuat pada Islam yang tersebar di sini.

Di fakultas hukum, sebaliknya, hukum Islam dilihat secara sangat formal. Yang dipelajari hanyalah aspek hukum Islam yang secara resmi dinyatakan berlaku oleh negara. Tentu saja ini bisa dimengerti mengingat fakultas hukum sejak lama memang menganut positivisme yuridis—di mana hanya negara saja yang memungkinkan suatu norma berkekuatan hukum. Ulasan di sekitar peresapan hukum Islam oleh hukum adat biasanya hanya merupakan bagian pengantar dan menjadi pembenar bagi pandangan yang positivistik itu. Kaji yang mendalam tentang dinamik yang hidup dalam tolak-tarik antara Islam dan adat, serta antara Islam dan bentuk masyarakat politik yang ditemuinya, dianggap berada di luar kawasan para ahli hukum. Aliran sejarah dari Von Savigny jelas tak punya pengaruh; demikian juga *rechtsethnologie* dari para pendekar hukum adat hampir-hampir mendekati masa punahnya. Sementara itu, aliran sosiologis yang mulai nampak pada tulisan-tulisan

Sacipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto, masih belum jelas *juntrungnya*.

Dalam suasana serupa itu, buku M.B. Hooker mengenai hukum Islam di Asia Tenggara ini sungguh besar gunanya. *Pertama*, ia memberikan perspektif perbandingan yang lebih luas. *Kedua*, ia mengemukakan perkembangan historis sejak abad keenambelas, untuk menunjukkan bagaimana teknik hukum berkembang dari kurun ke kurun. *Ketiga*, dalam berbagai perubahan dan perbandingan itu, ia menampilkan ciri umum yang hampir sama, dan hal-hal pokok yang tetap berkesinambungan. Dengan demikian akan jelas tercermin, bagaimana hukum bertaut erat dengan perkembangan masyarakatnya. Bahkan penelitiannya mengenai hukum Islam ini dianggapnya sebagai suatu langkah ke arah memahami kultur hukum Asia Tenggara.

Memahami benar tradisi klasifikasi pengetahuan Islam secara baik, Hooker mengatakan bahwa tak mungkin memisahkan hukum



Islam dari teologi, bahkan dari tasawuf sekalipun. Pemisahan antara ilmu kalam, fikih dan tasawuf memang asing buat orang Islam, apalagi untuk mereka yang berpendapat bahwa syariat (hukum) itu hanya satu tahap saja dalam perjalanan panjang ke tahap tarikat untuk selanjutnya ke tahap makrifat.

Tentu saja bukan maksud Hooker untuk sekedar berhenti pada mengemukakan taut-menaut saja. Ia menyajikan banyak kasus hukum yang kongkrit ketika melacak soal "pilihan hukum" untuk berbagai konflik yang melibatkan berbagai hukum sekaligus. Ini nampak dalam bagian tentang Birma, daerah-daerah Selat Malaka, dan Singapura—di mana yurisprudensi merupakan sumber hukum yang berpengaruh sekali.

Untuk Indonesia, Hooker mengemukakan manifestasi yang berbeda-beda dari hukum Islam yang berlaku di Aceh, Minangkabau dan Jawa. Sayang tak banyak yang diceritakannya tentang Sulawesi atau daerah Indonesia Timur lainnya, seperti Ternate, Maluku.

Memang merupakan pendapatnya bahwa ciri hukum Islam di Asia Tenggara adalah relativitasnya yang berlebih-lebihan, menurut tempat dan waktu, malahan penuh fragmentasi. Karena itu tak mengherankan bila dijumpai keanekaragaman yang mengejutkan, apalagi jika dibandingkan dengan apa yang terlihat di Birma, Muangthai Selatan, Mindanao, bahkan Serawak dan Brunei. Mengikuti pemaparan perbandingan yang luas itu, memang kita rasakan ketegangan yang laten antara prinsip-prinsip Islam dan kultur setempat.

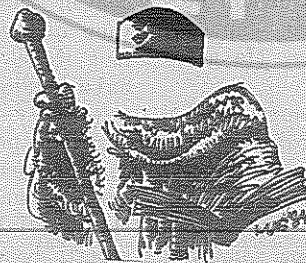
Hal lain yang nampak umum adalah pertautan antara Islam dan negara-negara

bandar yang sedang mencari legitimasi untuk kedaulatannya. Ini kemudian menumbuhkan kepustakaan hukum yang khas. Tetapi Jawa nampaknya agak menyimpang dalam hal ini, karena di sini soal-soal legitimasi dan kedaulatan politik lebih bersumber pada warisan Hindu. Dalam keadaan serupa itu, hukum Islam lantas menjadi semacam daerah khusus kaum intelektual-yuris, yang bertakik-takik dan banyak polemik, tetapi—menurut Hooker—sering terasa kurang bertaut dengan pengalaman nyata masyarakat.

Ciri umum yang timbul dari kesamaan pengalaman Asia Tenggara diringkaskan oleh Hooker dalam tiga butir. *Pertama*, senantiasa nampak akomodasi antara syariah dan perumusan lokal. *Kedua*, di bawah dominasi kolonial, syariah dirumuskan kembali dalam terminologi hukum Eropa, dan dibatasi lingkup serta isinya pada hukum keluarga (ini yang kemudian jadi pokok kajian fakultas hukum di Indonesia). Dan *ketiga*, setelah perang, nampak tendensi meningkatnya anasir hukum Islam dalam hukum substantif. Ini jelas terlihat di Malaysia dan Indonesia, menurut Hooker, tetapi kurang di Singapura dan Filipina Selatan. Di Birma malahan tidak ada sama sekali.

Buku Hooker ini, sekalipun membahas hukum secara cermat, tetapi tidak sesulit buku-buku pelajaran hukum yang senantiasa berbelit-belit itu. Gaya bahasa Hooker lancar dan mudah dipahami. Hingga kalangan muslim yang bukan yuris akan tidak menemukan kesulitan dalam membaca buku yang piawai ini.

ASWAB MAHASIN



Kyai Hasyim Asy'ari, Antara Tradisional dan Modern

Setiap tulisan Dr. Zamakhsyari Dhofier muncul di majalah ini, saya selalu mengikuti secara saksama. Terus terang saya banyak dapat informasi baru dan wawasan yang luas dari tulisan-rulisannya, terutama pandangannya tentang Islam tradisional. Kupasan yang begitu mendetail juga ditunjang oleh: 1. Latar belakang hidup beliau yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren (basis pendidikan Islam tradisional); 2. Tesis yang diajukannya untuk mencapai gelar Doktor dalam bidang antropologi, memang membahas tradisi pesantren dan pandangan hidup kyai-kyai tradisional. Jadi jelas penulisnya betul-betul ahli dalam bidang ini. Hal inilah barangkali yang menyebabkan tulisan-tulisannya reaktif dan apologis terhadap pandangan kaum yang menyatakan diri sebagai Islam modernis tentang Islam tradisional. Tetapi yang jelas sebagai seorang ilmuwan, penulisnya dituntut untuk jujur dan bukan apologi.

Tulisan Zamakhsyari Dhofier tentang tokoh Kyai Hasyim Asy'ari dalam *Prisma* No. 1/1984, terasa kering dari informasi baru. Walaupun mencoba menuangkan pandangan secara luas sampai pada tahap-tahap perubahan sosial, kultural, dan politik yang pernah dilewati oleh Kyai Hasyim Asy'ari. Pokok-pokok pikiran itu jika kita kaji merupakan pemindahan dari tulisan Zamakhsyari sendiri, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1980).

Pada pokoknya saya sependapat dengan Pak Zamakhsyari Dhofier, bahwa kyai Hasyim mempunyai pengaruh yang begitu besar di kalangan Islam tradisional (baca: NU). Tetapi pengaruh itu tidak hanya terbatas di kalangan Islam tradisional saja, melainkan sampai menembus pada kalangan Islam modernis. Sepanjang yang saya ketahui, dalam masalah madzhab, beliau sangat

moderat. Hal ini dapat saya ketahui dari teks pidato beliau pada salah satu muktamar NU yang menyerukan pada segenap ulama-ulama NU untuk melepaskan diri dari kefanatikan mereka untuk berpegang teguh pada madzhab (baca: *taqlid*). Pendapat yang dikutip oleh Pak Dhofier dari *Qonun asasi Nahdlatul Ulama*, yang menyatakan bahwa menafsirkan Al-Qur'an dan Al-Hadits tanpa mempelajari dan meneliti buku-buku para ulama madzhab, hanya akan menghasilkan pemutarbalikan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, itu menurut saya bukan pendapat Kyai Hasyim pribadi, tetapi pendapat ulama NU secara keseluruhan. Karakteristik ulama-ulama NU—yang bersikeras untuk memegang teguh ajaran madzhab dan tidak mungkin lagi pada masa kini ada orang yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi *mujtahid* mutlak—bukanlah pengaruh dari pikiran Kyai Hasyim Asy'ari, tetapi dari pikiran Kyai Abd. Wahab Hasbullah atau Kyai Sirajuddin Abbas (tokoh PERTI), sebuah organisasi keagamaan yang berpegang teguh pada madzhab Syafi'i. Tulisan-tulisan Kyai Sirajuddin Abbas banyak digunakan sebagai landasan berpikir oleh warga NU.

Dalam masalah *Tharekat*, Kyai Hasyim melarang santri-santri Tebuireng untuk mengikuti gerakan itu apa pun bentuk dan alirannya, bahkan beliau pernah berdebat dengan salah seorang mursyid Tharekat yang mengaku wali. Pandangan beliau tentang tharekat dan wali dapat dibaca dalam buku karangannya berjudul *Al-Dururul Muntatsiroh*, yang sudah diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Dr. Thalhan Mansoer SH dengan judul *Taburan Mutiara Berharga* (Menara Kudus, 1971). Sikap kyai Hasyim ini diikuti oleh santri-santrinya seperti Kyai As'ad Sukorejo, Kyai Abdul Karim Lirbaya dan Kyai Abu Rasyad Sampang, yang melarang para santri mereka mengikuti gerakan Tharekat.

Pikiran-pikiran Kyai Hasyim itu banyak tidak diketahui umum, mereka mengira karakteristik NU merupakan pikiran Kyai Hasyim. Padahal jika kita pelajari pikiran-pikiran beliau, amalan-amalan warga NU pada umumnya jauh dari yang dicita-citakan oleh Kyai Hasyim. Justeru itulah tidak heran, jika banyak di antara eks santri Tebuireng yang aktif dan menjadi pimpinan Muhammadiyah (Islam moderen). Dengan demikian saya beranggapan bahwa pengaruh Kyai Hasyim tidak hanya menonjol di kalangan Islam tradisional, tetapi juga di kalangan Islam moderen.

Semoga dalam waktu-waktu mendatang ada ilmuwan yang tertarik untuk meneliti dan menulis buah pikiran Kyai Hasyim tersebut secara mendalam. Atau barangkali Pak Dhofier, juga Gus Abdurrahman dapat memberi penjelasan ala kadarnya.

GHAZALI SAID

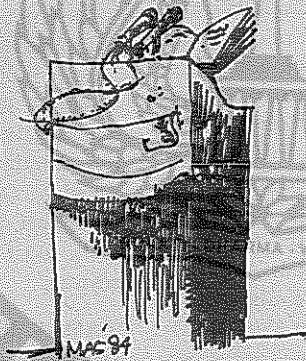
Mahasiswa Fak. Adab IAIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani 117 Surabaya.

Jawaban Zamakhsyari

Saya sangat menghargai komentar Sdr. dan setuju sekali dengan pikiran bahwa masih perlu pengkajian lebih lanjut buah pikiran Kyai Hasyim dalam karya-karya beliau yang sebetulnya masih banyak belum diterbitkan. Tentang pengaruh beliau di kalangan kaum modernis sudah tentu cukup besar dan beliau sebenarnya juga menghendaki penyebaran pikiran seluruh kaum muslimin Indonesia, termasuk mereka yang terpaku oleh praktek-praktek tarekat yang keliru.

Yang beliau maksudkan bermadzhab, memang sebenarnya tidak dalam bentuknya yang jumud, tetapi mempelajari pikiran para ulama masa lalu dan berusaha memahami bagaimana penafsiran yang benar. Sebab tanpa referensi dari mereka (tidak berarti terbelenggu) penafsir masa kini akan terlalu dipengaruhi kondisi subyektif.

Mudah-mudahan anda mafhum yang saya maksudkan.



Para Penulis

ABDURRAHMAN WAHID, lahir di Jombang, Jawa Timur, tahun 1940, adalah kolumnis pada berbagai media massa, pengasuh Pondok Pesantren "Ciganjur", Jakarta Selatan, dan Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Belajar di berbagai pesantren, kemudian melanjutkan studi ke *Universitas Al-Azhar* di Kairo, Mesir, dan *Universitas Baghdad* di Irak. Banyak menulis di berbagai media massa tentang masalah-masalah sosial, politik dan keagamaan, serta aktif mengikuti berbagai seminar dan pertemuan ilmiah di dalam dan luar negeri.

DEWI FORTUNA ANWAR, lahir di Bandung tanggal 22 Mei 1958, adalah staf peneliti pada LRKN-LIPI Jakarta. Setelah tamat dari *Secondary School* di London (1978), melanjutkan studi ke *School of Oriental and African Studies, University of London*, sehingga meraih *B.A.* untuk Sejarah Ketimuran dan Afrika, dan *M.A.* di bidang Studi Kawasan Asia Tenggara dengan thesis berjudul *Kaabah and Garuda The Dilemma of Islam in Indonesian Politics* (1982). Di antara tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan adalah "Wanita dalam Masyarakat Minangkabau" dan "Militer dan Politik di Indonesia: Sebuah Tinjauan" dalam *Masyarakat Indonesia*, No. 1/X, 1983, dan "Religion in Indonesia" dalam *Indonesia Guide Book*, akan diterbitkan oleh APA Production, Singapura. Banyak menulis artikel mengenai Asia Tenggara di *Harian Kompas*.

FACHRY ALLI, lahir tanggal 23 November 1954 di Susoh, Blang Pidie, Aceh Selatan, adalah staf Peneliti pada Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan mahasiswa tingkat terakhir Fakultas Adab Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Aktif mengikuti berbagai diskusi dan seminar, serta banyak menulis tentang masalah-masalah sosial, politik dan keagamaan di berbagai media massa, terutama *Kompas*, *Tempo*, *Panji Masyarakat* dan *Prisma*.

HASSAN HANAFI, lahir di Kairo, Mesir, tanggal 13 Februari 1935, adalah Guru Besar Filsafat pada Universitas Cairo, Mesir.

Memperoleh gelar sarjana filsafat dari *Universitas Cairo*, Mesir 1956, dan gelar *Doctorat d'Etat* dari *Universitas Sorbonne*, Perancis (1966). Pernah menjadi profesor tamu di Perancis (1969), Belgia (1970) dan Amerika Serikat (1971-1975). Diantara buku yang telah diterbitkan adalah: *Religious Dialog & Revolution: Essays on Judaism, Christianity and Islam*, (Cairo: Anglo Egyptian Bookshop, 1977), 244 halaman, *Les Methodes d'Exegese l'Exegese de la Phenomenologie, La Phenomenologie de l'Exegese, La Methode Islamique Generale*. Berbagai studi tentang Filsafat Kristen, Spinoza, Lessing, dan Sartre, ditambah dua karyanya yang kontemporer, telah membuat dirinya sebagai seorang ideolog Arab.

RUBEN NALENAN, lahir 18 Mei 1942 di Rote, NTT, adalah dosen, staf Purek I dan Sekretaris Lembaga Penelitian Sejarah Nasional *Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAC)* Jakarta. Lulus sarjana Sejarah Modern pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial Jurusan Sejarah/Antropologi, *Universitas Satya Wacana*, Salatiga. Pernah menjadi wartawan pada majalah *Topik* dan *Harian Merdeka* (1972). Mengikuti berbagai seminar tingkat nasional serta aktif menulis buku dan artikel tentang sejarah.

ZAMAKHSYARI DHOFIER, lahir di Salatiga tanggal 25 Juli 1941, adalah staf peneliti pada Badan Litbang Departemen Agama. Tamat dari *Perguruan Tinggi Publisistik* tahun 1971, kemudian melanjutkan studinya dalam bidang Sosiologi dan Antropologi di *Australian National University*, Canberra, Australia, sehingga meraih gelar *M.A.* (1976) dan *Ph.D.* dengan disertasi berjudul *Pesantren Tradition*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982). Banyak menulis di majalah *Prisma* dan *Indonesia* (terbitan Cornell University A.S.), dan tulisannya mengenai pesantren dimuat dalam bunga rampai Indonesia: *Australian Perspective*, terbitan Research School of Pacific Studies (1980).